



Sertijab Kepala BPK Perwakilan Kalbar

Joko Pelajari Difisit Anggaran Pemprov

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar dari Dra Ida Sundari kepada Joko Agus Setyono. Dalam sambutannya, Joko berkomitmen akan mendalami defisit anggaran yang terjadi di Pemprov Kalbar.

itu," ujar Joko usai sertijab. Joko yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ini juga meminta waktu agar dapat mempelajari faktor yang menyebabkan defisit anggaran pada APBD Kalbar itu.

"Saya masih baru di sini dan belum bisa berkomentar banyak untuk masalah defisit itu, nanti kalau sudah berjalan, akan kita pelajari kenapa sampai bisa defisit APBD-nya," tukas Joko.

■ Bersambung ke hal. 11



Jabat Kepala, BPK Perwakilan Kalbar, Ini Komitmen Joko Agus Setyono

SERIJAB - Kepala BKP Kalbar bersama para pejabat yang hadir dalam acara sertijab di Kantor BPK Kalimantan Barat, Jl A Yani Pontianak, Jumat (7/9).

TRIBUN/NUR



Joko Pelajari Difisit Anggaran Pemrov

Sambungan Hal.9

Selain melanjutkan program ataupun pekerjaan rumah yang masih belum selesai pada masa jabatan Kepala BPK sebelumnya, Joko juga berkomitmen untuk mengajak bersama-sama membangun Kalbar bersama BPK dan seluruh warga Kalbar baik media, masyarakat sipil, instansi, dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

"Saya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Ibu Ida Sundari sebagai Kepala BPK perwakilan Kalbar sebelumnya, komitmen saya adalah membangun Kalbar dari unit kerja yang saya bidangi," tutur Joko.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan dalam sambutannya, jika kinerja BPK perwakilan Kalbar yang sebelumnya dapat lebih di tingkatkan lagi oleh pejabat yang baru ini.

Sutarmidji juga mengingatkan untuk

seluruh Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan negara khususnya masalah keuangan.

"Harapan saya Kepala BPK yang baru dapat lebih hebat lagi dari yang sebelumnya, karena saya lihat sampai saat ini sudah ada 11 daerah yang dinyatakan WTP dan ada satu daerah yang memerlukan penganan khusus. Saya berharap hin-

dari kasus penyelewengan keuangan sekecil apapun," tutur Sutarmidji.

Pada kesempatannya Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis mengatakan, jika peningkatan jumlah opini WTP di beberapa Kabupaten di Kalbar itu belum lah cukup, menu- rutnya WTP adalah sebuah kewajiban yang wajib dipenuhi dan pada intinya Pemda harus menunjukkan peningkatan angka kemak-

muran warga didaerahnya.

"Tidak cukup WTP, WTP itu syarat minimal, suatu kewajiban itu malah. Dia harus menunjukkan berapa angka kemakmuran selama pemerintahan, saya ambil contoh jika bupati dilantik angka kemiskinan seribu dan lima tahun kemudian naik menjadi dua ribu, berarti ia gagal di mata saya dan jangan dipilih lagi kalau bisa. Itu yang ingin saya dorong," tegas Harry. **(nur imam)**